



STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN SUBANG

Cici Pitria¹⁾, Arlan Siddha²⁾, Lukman Munawar Fauzi³⁾

1,2,3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Daerah dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Subang yang dinilai belum berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan teori strategi dari David (2011) yang mencakup tiga tahap: perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan unit analisis Kabupaten Subang. Informan terdiri dari pihak Dinas Kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD), Yayasan Resik, dan masyarakat pengidap HIV/AIDS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perumusan strategi, telah terdapat visi dan misi penanggulangan HIV/AIDS serta analisis terhadap kondisi internal dan eksternal. Pada tahap penerapan, strategi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, KPAD, LSM, dan yayasan, serta didukung oleh CSR beberapa perusahaan BUMN. Pada tahap penilaian strategi, dilakukan evaluasi terhadap kegiatan pengurangan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA, serta adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam pengalokasian dana dan kebijakan pendukung. Hambatan yang dihadapi antara lain rendahnya pendidikan, keterbatasan sumber daya, kesenjangan sosial, dan migrasi. Upaya mengatasinya dilakukan melalui edukasi, anggaran khusus, koordinasi lintas sektor, dan pemahaman HAM. Secara umum, strategi penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Subang dinilai cukup baik namun masih membutuhkan penguatan di berbagai aspek.

Kata Kunci: Strategi, Pemerintah Daerah, HIV/AIDS.

ABSTRACT

This study aims to analyze the local government's strategy in combating HIV/AIDS in Subang Regency, which has not yet been implemented optimally. The research is grounded in David's (2011) strategic management theory, which outlines three key stages: strategy formulation, strategy implementation, and strategy evaluation. This descriptive qualitative research focuses on Subang Regency as the unit of analysis. Informants include the Head of Disease Prevention and Control at the Subang Health Office, the Executive Chairperson of the Subang AIDS Commission (KPAD), the Head of the Resik Foundation, and two individuals living with HIV/AIDS. The findings reveal that in the formulation stage, there is a clear vision and mission for HIV/AIDS mitigation, and internal and external condition mapping has been conducted. In the implementation stage, the Subang Health Office, KPAD, NGOs, and foundations play central roles, supported by CSR contributions from several state-owned enterprises. In the evaluation stage, efforts focus on reducing stigma and discrimination against

people living with HIV/AIDS (PLWHA), and strengthening the government's commitment through funding and policy support. Challenges include low education levels, limited resources, social and economic inequality, and population migration. Solutions involve public education, dedicated budgeting, cross-sector coordination, and promoting human rights awareness. Overall, the local government's efforts are commendable but require further enhancement.

Keywords: Strategy, Local Government, HIV/AIDS.

PENDAHULUAN

Fenomena penyebaran HIV/AIDS dewasa ini menjadi isu kesehatan masyarakat yang sangat kompleks, bukan hanya di tingkat global, tetapi juga di tingkat nasional dan daerah. Penyakit yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia secara perlahan dan kronis, mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh yang drastis hingga tahap paling parah yang dikenal sebagai AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*). Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, penyebaran HIV/AIDS terus mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Laporan dari UNAIDS (*Joint United Nations Programme on HIV/AIDS*) tahun 2021 menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan kasus infeksi HIV baru tertinggi di kawasan Asia Pasifik. Fakta ini tentu menjadi keprihatinan nasional yang memerlukan penanganan serius dari seluruh lapisan pemerintahan, termasuk pemerintah daerah sebagai pelaksana utama otonomi dalam bidang kesehatan masyarakat.

Kasus HIV/AIDS di Indonesia telah menyebar hampir di seluruh provinsi, dari kota besar hingga pelosok desa. Salah satu wilayah yang mengalami peningkatan kasus HIV/AIDS secara signifikan adalah Kabupaten Subang di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten ini memiliki karakteristik geografis yang strategis, yaitu sebagai lintasan jalan nasional yang menghubungkan beberapa kota besar di Pulau Jawa. Di sepanjang jalur ini, terdapat aktivitas ekonomi dan sosial yang sangat tinggi, termasuk keberadaan tempat-tempat hiburan malam, lokalisasi terselubung, serta warung remang-remang yang berpotensi menjadi titik penyebaran HIV/AIDS melalui praktik hubungan seksual berisiko. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, ditambah dengan minimnya informasi dan

edukasi terkait HIV/AIDS, menjadi faktor yang memperburuk penyebaran virus ini di masyarakat Subang.

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Subang menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2021, tercatat ada 2.068 kasus HIV/AIDS, kemudian naik menjadi 2.408 kasus pada tahun 2022, dan melonjak lagi menjadi 2.692 kasus pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa strategi yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah masih belum memberikan dampak yang optimal. Bahkan, jika tren ini terus berlangsung tanpa intervensi yang tepat, maka target global untuk mengakhiri HIV/AIDS pada tahun 2030 (Ending AIDS 2030) tidak akan tercapai. Maka dari itu, sangat penting untuk mengevaluasi strategi dan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam bidang kesehatan masyarakat, termasuk penanggulangan HIV/AIDS. Pemerintah Kabupaten Subang sendiri telah menyusun Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS sebagai bentuk komitmen hukum dalam menghadapi permasalahan ini. Namun, dalam implementasinya, Perda tersebut masih menemui berbagai kendala di lapangan, baik dari sisi teknis, kelembagaan, budaya, maupun sumber daya. Kelemahan implementasi tersebut tampak dalam berbagai aspek, mulai dari kurangnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan anggaran dan tenaga medis, hingga masih kuatnya stigma negatif masyarakat terhadap ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS).

Salah satu kekeliruan umum dalam strategi penanggulangan HIV/AIDS yang terjadi di Kabupaten Subang adalah fokus yang terlalu sempit, yaitu hanya menargetkan kelompok pekerja seks komersial dan pengguna narkoba suntik. Padahal, seiring dengan menyebarnya virus HIV ke lapisan masyarakat yang lebih luas, kelompok lain seperti ibu rumah tangga, remaja, dan bahkan anak-anak juga mulai menjadi kelompok rentan. Tanpa adanya pendekatan yang lebih inklusif dan menyeluruh, strategi penanggulangan HIV/AIDS akan terus bersifat reaktif, bukan preventif.

Pendekatan strategis yang ideal harus bersifat holistik dan menyentuh berbagai aspek—kesehatan, sosial, ekonomi, budaya, dan edukasi. Strategi tersebut haruslah berlandaskan pada kerangka teoritis yang sistematis dan telah terbukti berhasil. Salah satu teori yang dapat digunakan dalam menganalisis strategi organisasi publik seperti pemerintah daerah adalah teori dari Fred R. David (2011), yang membagi proses strategi menjadi tiga tahap, yaitu perumusan strategi (strategy formulation), pelaksanaan strategi (strategy implementation), dan evaluasi strategi (strategy evaluation). Dalam konteks penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Subang, perumusan strategi mencakup penyusunan visi dan misi yang jelas, identifikasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi, serta peluang dan ancaman dari eksternal. Pelaksanaan strategi mengacu pada bagaimana rencana tersebut diterjemahkan ke dalam program-program nyata, sedangkan evaluasi strategi merupakan proses untuk mengukur keberhasilan implementasi dan menentukan apakah penyesuaian strategi diperlukan.

Selain itu, strategi penanggulangan HIV/AIDS tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab instansi kesehatan saja, tetapi membutuhkan kolaborasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Konsep tata kelola kolaboratif (collaborative governance) seperti yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007) menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik sangat tergantung pada sinergi antara aktor pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Dalam praktiknya, kolaborasi ini seringkali tidak berjalan efektif akibat tidak adanya regulasi yang mengatur secara teknis, lemahnya kapasitas kelembagaan, atau rendahnya partisipasi publik.

Di Kabupaten Subang sendiri, beberapa LSM seperti Yayasan Resik telah terlibat aktif dalam mendampingi ODHA dan melakukan edukasi publik. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) juga telah dibentuk sebagai upaya sinergis lintas sektor. Namun, keterbatasan pendanaan, minimnya tenaga ahli, serta kurangnya integrasi antara Dinas Kesehatan, KPAD, dan organisasi masyarakat sipil membuat kolaborasi ini belum mampu menghasilkan perubahan yang signifikan. Program sosialisasi HIV/AIDS yang dilakukan di sekolah-sekolah, tempat ibadah, maupun ruang

publik lainnya masih sangat terbatas, sehingga kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan HIV/AIDS belum terbentuk secara merata. Di sisi lain, stigma dan diskriminasi terhadap ODHA masih menjadi persoalan utama yang menghambat upaya penanggulangan HIV/AIDS. Banyak penderita yang enggan memeriksakan diri atau mengakses layanan kesehatan karena takut dikucilkan oleh masyarakat. Akibatnya, diagnosis dan pengobatan menjadi terlambat, dan risiko penularan kepada orang lain pun meningkat. Strategi penanggulangan HIV/AIDS yang tidak memperhitungkan aspek sosial-budaya seperti ini pada akhirnya menjadi tidak efektif dan bahkan kontraproduktif.

Pendidikan dan informasi yang benar mengenai HIV/AIDS harus menjadi pilar utama dalam strategi pemerintah daerah. Kampanye edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan masif, bukan hanya saat Hari AIDS Sedunia saja. Materi kampanye harus disesuaikan dengan karakteristik lokal, bahasa, dan budaya masyarakat Subang agar mudah dipahami dan diterima. Selain itu, perlu adanya keterlibatan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan tokoh pemuda untuk memberikan legitimasi sosial terhadap program penanggulangan HIV/AIDS yang dijalankan oleh pemerintah.

Strategi ke depan juga harus berorientasi pada pembangunan sistem informasi kesehatan yang komprehensif. Data yang akurat dan real-time mengenai penyebaran HIV/AIDS sangat penting untuk menyusun kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Sayangnya, hingga saat ini sistem pencatatan dan pelaporan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Subang masih belum terintegrasi dan seringkali bersifat manual. Hal ini menyulitkan proses pemantauan dan evaluasi, serta menghambat upaya intervensi yang tepat sasaran.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Subang perlu menyusun roadmap strategis yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang, lengkap dengan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) yang dapat diukur secara berkala. Roadmap ini harus melibatkan partisipasi lintas sektor sejak tahap perencanaan hingga implementasi. Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya

manusia di Dinas Kesehatan dan KPAD melalui pelatihan, workshop, dan pengembangan kompetensi berbasis hasil riset terkini.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan HIV/AIDS, menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menggali upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas strategi tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pemerintahan, serta menjadi referensi kebijakan publik dalam bidang kesehatan masyarakat yang berbasis pada kondisi lokal dan kebutuhan nyata masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus untuk memahami secara mendalam bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Subang merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi penanggulangan HIV/AIDS. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap realitas sosial dan dinamika kebijakan dalam konteks lokal secara utuh dan kontekstual. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menghasilkan deskripsi yang kaya, mendalam, dan mendetail mengenai fenomena yang sedang diteliti, serta memungkinkan peneliti memahami makna di balik tindakan, kebijakan, dan pengalaman para aktor yang terlibat langsung dalam isu HIV/AIDS di daerah tersebut.

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, yang dipilih secara purposif berdasarkan data epidemiologis yang menunjukkan tingginya angka kasus HIV/AIDS dalam beberapa tahun terakhir. Kabupaten ini merupakan jalur strategis di kawasan utara Jawa Barat yang menjadi lintasan aktivitas sosial dan ekonomi, serta dikenal memiliki titik-titik rawan penyebaran HIV/AIDS seperti warung remang-remang, lokalisasi terselubung, dan komunitas pekerja seks. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu antara Maret hingga Mei 2025, dengan proses pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pedoman yang disusun berdasarkan fokus penelitian, untuk menggali informasi dari para informan kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam strategi penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Subang. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria mereka yang secara langsung terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, atau evaluasi kebijakan terkait HIV/AIDS. Informan yang diwawancarai terdiri dari Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Ketua Harian Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Subang, Ketua Yayasan Resik yang merupakan LSM lokal aktif dalam pendampingan ODHA, serta dua orang penderita HIV/AIDS (ODHA) sebagai representasi dari masyarakat terdampak langsung. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi terhadap kegiatan sosialisasi, pelayanan kesehatan, serta aktivitas komunitas pendukung ODHA. Sementara itu, data dokumenter yang dikaji meliputi peraturan daerah, laporan tahunan instansi terkait, serta arsip berita daring dari media lokal dan nasional.

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik, yaitu mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema utama yang muncul dari data lapangan berdasarkan fokus penelitian. Seluruh data dianalisis dengan mengacu pada teori strategi dari Fred R. David (2011), yang membagi proses strategi menjadi tiga tahapan utama: perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Perumusan strategi mencakup proses penyusunan visi, misi, dan tujuan strategis, serta identifikasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (analisis SWOT). Implementasi strategi mencakup bagaimana strategi yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam program konkret, termasuk bagaimana sumber daya dikelola dan bagaimana koordinasi antarsektor dijalankan. Evaluasi strategi menyoroti mekanisme pemantauan dan pengukuran keberhasilan dari implementasi strategi tersebut serta sejauh mana langkah korektif dilakukan untuk perbaikan kebijakan.

Untuk menjaga validitas dan keandalan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Selain itu, untuk memastikan keabsahan temuan, peneliti menggunakan empat kriteria trustworthiness menurut Lincoln dan Guba, yaitu credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Kredibilitas dicapai dengan melakukan konfirmasi kepada informan (member checking) serta triangulasi data. Transferabilitas dijamin melalui deskripsi kontekstual yang rinci, dependabilitas dicapai dengan mencatat proses penelitian secara transparan dan sistematis, sementara confirmability diwujudkan melalui upaya menjaga objektivitas dan netralitas peneliti selama proses pengumpulan dan analisis data.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam menanggulangi HIV/AIDS diformulasikan, dijalankan, dan dievaluasi. Dengan pendekatan kualitatif, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoritis, baik bagi pengambil kebijakan maupun komunitas akademik, dalam memahami kompleksitas penanggulangan HIV/AIDS di tingkat daerah.

PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBINAAN ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan HIV/AIDS merupakan bentuk implementasi dari kewenangan otonomi daerah di bidang kesehatan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam merancang dan menjalankan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi lokal. Dalam konteks ini, strategi yang digunakan mengacu pada tiga tahapan strategis menurut Fred R. David (2011), yaitu perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi. Meskipun struktur strategi telah dirancang melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013, berbagai

hambatan dalam pelaksanaannya masih menyebabkan program penanggulangan HIV/AIDS belum mencapai efektivitas yang diharapkan.

Perumusan Strategi

Dalam tahap perumusan strategi, Pemerintah Kabupaten Subang telah menunjukkan inisiatif penting dengan merumuskan visi dan misi daerah yang berkaitan dengan pengendalian HIV/AIDS, yaitu mewujudkan masyarakat Subang yang sehat, inklusif, dan bebas dari diskriminasi terhadap ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS). Penyusunan strategi formal ini disertai dengan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT), yang mendasari arah kebijakan daerah. Kekuatan dalam konteks ini meliputi keberadaan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD), dukungan dari Dinas Kesehatan, serta adanya kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Yayasan Resik yang selama ini aktif dalam edukasi dan pendampingan ODHA.

Namun, kelemahan yang ditemukan meliputi kurangnya kapasitas SDM, rendahnya alokasi anggaran kesehatan untuk penanganan HIV/AIDS, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Pemerintah telah mengidentifikasi peluang strategis berupa dukungan regulasi nasional dan potensi kemitraan dengan sektor swasta. Namun, mereka juga menyadari ancaman eksternal berupa stigma masyarakat terhadap ODHA, meningkatnya mobilitas populasi di jalur Trans Jawa yang memperbesar potensi penyebaran HIV, serta keberadaan titik-titik prostitusi terselubung yang sulit ditindak tegas secara hukum.

Perumusan strategi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Subang secara normatif telah mengidentifikasi arah dan prioritas kebijakan secara tepat. Namun, dokumen strategi cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya dikaitkan dengan dinamika sosial-budaya serta kebutuhan masyarakat akar rumput. Dalam banyak kasus, kebijakan hanya menjadi dokumen legal tanpa kekuatan implementatif yang kuat di lapangan.

Implementasi Strategi

Tahap implementasi strategi menjadi fase paling krusial sekaligus paling menantang dalam penanggulangan HIV/AIDS. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, diketahui bahwa sejumlah program telah

dijalankan, seperti kampanye kesadaran HIV/AIDS di sekolah, promosi penggunaan kondom, layanan konseling dan tes sukarela (VCT), serta penyediaan antiretroviral (ARV) di fasilitas kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah telah menjalin kerja sama dengan Yayasan Resik untuk mendampingi ODHA, mengadakan pelatihan peer educator, dan menyelenggarakan peringatan Hari AIDS Sedunia.

Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu masalah mendasar adalah distribusi program yang tidak merata. Program-program pencegahan dan pengobatan lebih banyak difokuskan di pusat kota atau puskesmas utama, sementara daerah pinggiran dan pedesaan seringkali belum terjangkau. Hal ini menyebabkan banyak penderita yang tidak terdeteksi atau tidak mendapatkan layanan secara berkelanjutan. Minimnya tenaga kesehatan yang terlatih juga menjadi kendala dalam pelayanan terhadap ODHA. Banyak petugas puskesmas belum memiliki kompetensi dalam melakukan konseling HIV, mendampingi pasien ARV, maupun mengelola data dengan sistem pelaporan yang baik.

Keterbatasan anggaran juga menjadi isu utama yang menghambat implementasi. Anggaran untuk program HIV/AIDS sebagian besar berasal dari APBD dan hibah program vertikal, yang tidak selalu berkelanjutan. Selain itu, stigma sosial dan diskriminasi masih menjadi tantangan utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara dini. Banyak ODHA yang memilih menyembunyikan statusnya karena takut dikucilkan oleh keluarga, tetangga, maupun tempat kerja. Hal ini berdampak pada keterlambatan pengobatan, penularan kepada pasangan atau anak, dan rendahnya efektivitas program ARV.

Masalah lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam program yang dijalankan. Edukasi HIV/AIDS masih dianggap tabu dibicarakan di ruang publik, terutama oleh tokoh masyarakat dan agama. Akibatnya, pemerintah mengalami kesulitan dalam membangun dukungan komunitas terhadap program yang dijalankan. Pendekatan top-down yang terlalu birokratis juga mengakibatkan masyarakat kurang merasa memiliki program tersebut. Ini menjadi ironi, karena keberhasilan program kesehatan

masyarakat justru sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat itu sendiri.

Evaluasi Strategi

Tahap evaluasi strategi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program yang telah dirancang dan dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam praktiknya, evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Subang masih bersifat administratif dan reaktif. Tidak semua kegiatan memiliki indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) yang terukur secara kuantitatif. Laporan kegiatan cenderung hanya fokus pada jumlah pelatihan atau peserta kampanye, tanpa mengukur dampaknya terhadap perubahan perilaku, peningkatan kesadaran, atau penurunan angka infeksi baru.

Di sisi lain, tidak ada sistem pelaporan dan pemantauan yang terintegrasi antara Dinas Kesehatan, KPAD, puskesmas

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam penanggulangan HIV/AIDS telah disusun secara formal melalui Peraturan Daerah dan melibatkan lembaga teknis seperti Dinas Kesehatan dan KPAD. Strategi tersebut mengikuti tahapan perumusan, implementasi, dan evaluasi sebagaimana teori strategi yang dikemukakan oleh Fred R. David. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih belum optimal karena menghadapi berbagai kendala, antara lain: keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, distribusi layanan yang tidak merata, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, serta masih kuatnya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA.

Perumusan strategi telah mengidentifikasi masalah secara menyeluruh, namun belum sepenuhnya ditransformasikan ke dalam program yang responsif terhadap dinamika lokal. Implementasi strategi masih bersifat terpusat, tidak menyentuh wilayah pinggiran, dan minim pelibatan masyarakat. Evaluasi strategi cenderung administratif dan kurang berbasis data, sehingga belum mampu memandu proses perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, keterlibatan LSM seperti Yayasan Resik menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif berbasis komunitas memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas program. Keberhasilan kolaborasi ini dapat menjadi model replikasi dalam membangun tata kelola penanggulangan HIV/AIDS yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, diperlukan penguatan strategi melalui perluasan cakupan layanan, peningkatan kapasitas SDM, integrasi sistem informasi, edukasi publik yang berkelanjutan, serta sinergi lintas sektor yang lebih sistematis. Hanya dengan strategi yang komprehensif dan berbasis komunitas,

Kabupaten Subang dapat mempercepat penanggulangan HIV/AIDS dan berkontribusi dalam pencapaian target nasional maupun global, khususnya Ending AIDS 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alma, Buhari dan Ratih. Hurriyati 2008. *Manajemen Corporate & Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan*. Bandung: AlfaBeta

Alwasilah, A. Chaedar. 2002. *Dasar-Dasar Merancang Dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Dunia Pustaka Jaya.

Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

David, F. R. 2017. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat.

Effendy, O. U. 2013 . *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Grant, Robert M. 1999. *Analisis Strategi Kontemporer - Konsep - Teknik – Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.

Hatten, Kenneth J., Hatten, Mary L. 1996. *Effective Strategic Management*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Hariadi, Bambang. 2005. *Strategi Manajemen*. Jakarta: Bayumedia Publishing.

Kansil, C.S.T. 1993. *Sistem Pemerintahan Indonedia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

- Muhammad, S. 2012. *Strategi Pemerintahan Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Muljono, Djoko. 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Musanef. 1985. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Nasution.1996. *Metode Penelitian Naturlalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Noviana, N. 2016. *Konsep HIV/AIDS Seksualitas Kesehatan & Reproduksi*. Jakarta: CV. Trans Info Media.
- Pamudji. 1995. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pearce II, John A dan Robinson, Richard B. 2008. *Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Salusu, J. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: PT Grasindo.
- Setiarto, Haryo Bimo. 2021. *Penanganan Virus HIV/AIDS*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suradinata, Ermaya. 1998. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Bandung: Citra Grafika.
- Suryaningrat, Bayu. 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara.

Syafiie, Inu Kencana.1992. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Eresco.

Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra. 2006. *Manajemen Pelayanan Jasa*. Yogyakarta: Andi Offset.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi aksara,

Wheelen, Thomas L dan J David Hunger. 2004. *Managemen Strategis*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Dokumen:

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Nasional*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional*.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS*.

Republik Indonesia. *Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS*.